

# PARADIGMA BARU ABRI TANTANGAN DAN TEKAD ABRI SEBAGAI BHAYANGKARI NEGARA

Oleh : Jenderal TNI Wiranto

## I. PENGANTAR

Sebuah pergumulan argumentasi dalam wacana reformasi yang hingga kini belum sepenuhnya mencapai titik temu adalah di mana posisi ABRI dalam reformasi. Munculnya perbedaan visi dan persepsi dalam menyikapi dan peran ABRI lebih disebabkan oleh *framework* dan *cara pandang* yang berbeda.

Kemasan dan titik tolak pemahaman terutama kalangan kritisi terhadap peran ABRI dalam kehidupan kebangsaan di samping karena latar belakang pendidikan, juga munculnya peran politik ABRI yang dominan di masa lalu itu dianggap distortif. Sangat dipahami ketika reformasi bergulir sorotan kedua setelah suksesi adalah ABRI.

Dalam konteks itu apa yang sebenarnya terjadi dalam diri ABRI? Adakah ABRI tidak mengambil peran dalam reformasi? Ataukah ABRI justru menjadi penghalang reformasi dan ingin mempertahankan status quo



? Pertanyaan itu memang bukan sebatas pertanyaan kritis, tetapi merupakan pertanyaan besar yang harus dijawab. Sebab ABRI sebagai kekuatan nasional tentu tidak mungkin diabaikan dalam reformasi. ABRI sebagai kekuatan nasional, merupakan salah satu komponen bangsa yang juga menjadi salah satu variabel utama yang akan memberikan andil bagi sukses tidaknya gerakan reformasi.

Yang jadi persoalan pada dasarnya bukan siapa pro dan anti reformasi. ABRI sependapat yang menjadi persoalan besar bangsa ini dalam melaksanakan reformasi adalah bagaimana reformasi yang kita laksanakan di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami krisis ini dapat berlangsung aman dan terselematkan. ABRI sadar, ketika menemui berbagai penilaian dan sorotan akan posisi dan peran ABRI dalam reformasi sehingga kitapun berupaya merespons dan mencermatinya. Komitmen ABRI

sebagai bhayangkari negara itulah yang menempatkan sikap ABRI tidak dobel kehilangan kearifan dan kendali. Meskipun banyak masalah dan pilihan-pilihan yang sangat sulit dan pelik yang harus dihadapi dan diselesaikan.

Berangkat dari pemahaman dasar itulah maka untuk menjawab pertanyaan kritis seputar posisi, komitmen, dan peran ABRI dalam reformasi serta bagaimana paradigma baru peran ABRI dalam kehidupan kebangsaan di masa depan, ada 3 (tiga) agenda yang ingin saya kedepankan dalam kesempatan dialog ini. Tiga agenda itu meliputi :

- Pertama,* posisi ABRI dalam reformasi
- Kedua,* reformasi internal ABRI dan refleksi kritis terhadap realitas reformasi.
- Ketiga,* komitmen ABRI menyelamatkan bangsa dan negara.

## II. POSISI ABRI DALAM REFORMASI

Banyak kalangan menaruh harapan besar akan posisi ABRI dalam reformasi. Sebagai salah satu institusi yang memiliki legitimasi struktural dan kultural dalam kehidupan kebangsaan, posisi ABRI sangat strategis dalam menggerakkan reformasi. Tetapi kemudian muncul sikap pesimis dan skeptis terhadap ABRI. ABRI dinilai tidak mengambil posisi dalam reformasi. ABRI

dikesankan tetap menjadi bagian dari format masa lalu.

Bagi ABRI penilaian subyektif itu sangat dipahami benar. Situasi yang terjadi pada saat itu ketika *euphoria reformasi* tengah berlangsung penilaian terhadap posisi ABRI sangat beragam.

Ada yang berpendapat bahwa ABRI sebagai bhayangkari negara telah mengambil posisi yang *tepat* dan *proporsional*. Ada pula yang berpendapat ABRI terlambat mengambil posisi. Bahkan yang lebih ekstrim mengatakan ABRI sama sekali tidak mengambil posisi dan peran dalam reformasi. ABRI dinilai tidak pro reformasi, bahkan cenderung status quo.

Melihat beragamnya penilaian terhadap posisi ABRI dalam reformasi, menandakan bahwa seluruh bangsa ini sangat berkepentingan terhadap ABRI. Tidak ada satu institusi manapun yang mendapat perhatian besar, disorot dan dikritik bertubi-tubi selain ABRI. Bagi ABRI semua sorotan dan kritikan itu dicermati, *dipilih* dan *dipilih*. Ternyata tidak seluruh kritikan yang disampaikan kepada ABRI itu jujur dan fair. Tidak pula memberikan solusi dan alternatif. Bila ada kritikan dan saran yang sangat konstruktif, ABRI pasti akan menerima dengan tangan terbuka. Sebaliknya jika kritikan itu tanpa saran dan solusi, ABRI tentu akan berpikir keras apa yang harus dan akan dilakukan dengan kritikan itu. Sebaliknya jika kritikan itu hanyalah manifestasi dan peluapan dendam masa lalu, maka ABRI akan mengarifinya tanpa harus bertindak over produktif. Namun apa

yang terjadi justru yang paling banyak berkomunikasi ke tengah-tengah masyarakat adalah berbagai sorotan dan kritikan dari sisi negatifnya saja.

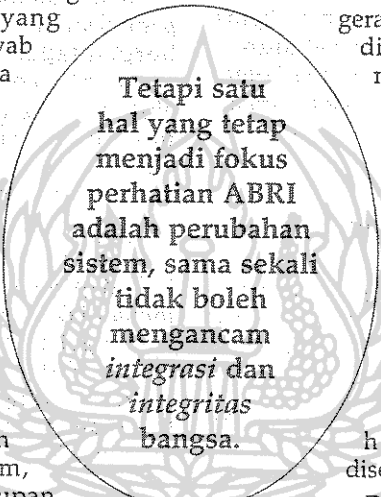
Berbicara masalah posisi dan peran ABRI dalam reformasi haruslah dilihat secara jernih dan utuh, bagaimana posisi dan peran ABRI dalam kehidupan kebangsaan. Sebagai bhayangkari negara tidak bisa lain posisi ABRI adalah sebagai komponen *bangsa* yang ikut bertanggungjawab mengamankan negara inisebagaimana yang diamanatkan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) untuk memikul tugas dan tanggung jawab : *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan *Ketiga*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Inilah sebenarnya yang melatarbelakangi dan menjadi basis pemikiran dalam melihat apa dan bagaimana posisi dan peran ABRI dalam kehidupan kebangsaan. Bagi ABRI keselamatan bangsa merupakan *taruhan* yang tidak memiliki pilihan. Oleh sebab itu ABRI sebagai bagian dari sebuah sistem nasional harus mengamankan sistem itu. Sebaliknya

jika sistem nasional itu berubah ABRI pasti harus berubah. Tetapi satu hal yang tetap menjadi fokus perhatian ABRI adalah perubahan sistem, sama sekali tidak boleh mengancam *integrasi* dan *integritas* bangsa.

Ketika reformasi tengah kita gulirkan, kemudian muncul ancaman disintegrasikan, adakah fenomena itu boleh dianggap sebatas wacana reformasi. Jika kemudian gerakan untuk memisahkan diri dari republik terus mengalir dan kencang, apakah kita tetap saja dapat mengatakan itu bagian demokrasi. Bagi ABRI bicara soal kedaulatan adalah bicara hidup dan mati. Maksudnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 harus diamankan dan diselamatkan.

Dalam konteks itulah, ABRI sejak semula secara konsisten *menyikapi* dan *merespons* bagaimana reformasi ini dilaksanakan. Prinsip dasar yang melandasi sikap tersebut adalah jangan sampai reformasi yang kita gulirkan *salah dipahami* dan *salah diartikan*. Adakah kita bersepakat untuk memberi toleransi jika karena perbedaan kepentingan dan pendapat kemudian ada pemaksaan kehendak dengan melakukan tindakan melawan hukum. Bagi masyarakat luas fenomena itu yang saat ini mereka pahami. Jangan



**Tetapi satu hal yang tetap menjadi fokus perhatian ABRI adalah perubahan sistem, sama sekali tidak boleh mengancam integrasi dan integritas bangsa.**

---

Reformasi adalah sebuah keharusan untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi harus dilaksanakan secara konstitusional, konseptual, dan terkendali.

---

heran pembakaran kantor Polsek, penyerangan, perampasan tanah dan tindakan anarki misalnya, disikapi masyarakat sebagai bagian dari reformasi.

Di tengah kesulitan akibat krisis yang belum sepenuhnya dapat kita pulihkan, risiko dan eksekusi reformasi yang dilaksanakan tanpa mengindahkan hukum akan menimbulkan ancaman terhadap ketenangan dan keselamatan rakyat. Itulah sebabnya sejak semula sikap dan pandangan politik ABRI tentang reformasi ini sangat tegas :

Reformasi adalah sebuah keharusan untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi harus dilaksanakan secara konstitusional, konseptual, dan terkendali. Sikap pandangan politik ABRI seperti itu secara resmi telah disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam SU MPR pada bulan Maret 1998 yang lalu. Dari sini jelas bahwa ABRI menyadari dihadapkan tuntutan dan tantangan masa depan serta pengaruh perubahan lingkungan strategis, reformasi

merupakan sebuah kebutuhan. Dari sikap dan pandangan politik ABRI seperti itulah ABRI mengambil posisi yang tepat bagaimana melaksanakan reformasi.

### III. REFORMASI INTERNAL ABRI DAN REFLEKSI KRITIS TERHADAP REALITAS REFORMASI

Konsistensi ABRI dalam melaksanakan reformasi tidak semata-mata didasari oleh desakan apalagi tekanan eksternal yang bertubi-tubi. Bagi ABRI, keharusan melaksanakan reformasi lebih didasari pada realitas tuntutan obyektif terhadap tantangan dan perubahan masa depan. Itulah sebabnya reformasi yang dilaksanakan ABRI berdimensi internal dan eksternal, mencakup reformasi struktural dan kultural.

ABRI melakukan perhitungan dengan cermat agar reformasi tidak salah arah dan menimbulkan eksekusi yang dapat membahayakan eksistensi bangsa. Berkali-kali ABRI mengingatkan bahwa reformasi hendaknya dilaksanakan secara konstitusional, konseptual, jelas agenda dan prioritasnya, serta dikendalikan, sehingga tidak menimbulkan eksekusi dan risiko bagi keselamatan bangsa. Reformasi jelas merupakan proses dan memerlukan waktu. Atas dasar itu pulalah reformasi internal ABRI dilaksanakan dan akan terus berjalan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi nasional.

Selama satu tahun sejak bulan Maret tahun lalu, reformasi internal ABRI secara kualitatif dan kuantitatif

telah menghasilkan perubahan besar dan mendasar. Menurut penilaian ABRI apa yang telah dan tengah dilakukan ABRI dalam mereformasi diri boleh dikatakan sebuah perubahan yang *sangat dramatis*. Hanya dalam rentang waktu satu tahun perubahan mendasar telah berhasil dilaksanakan. Ada 14 (empat belas) perubahan mendasar yang telah dihasilkannya (daftar terlampir). Secara kuantitatif jumlah itu akan terus bertambah, karena proses reformasi terus berjalan.

Didasari oleh kesadaran perlunya melaksanakan perubahan paradigma terhadap peran ABRI selama ini, ABRI telah berhasil merumuskan paradigma baru peran ABRI abad XXI. Paradigma baru peran ABRI abad XXI inilah yang akan mendasari seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan reformasi internal ABRI. Di sana dijelaskan bahwa paradigma baru peran ABRI yang didasarkan pada visi ABRI ke depan adalah : *merupakan kekuatan pertahanan keamanan yang profesional, efektif, efisien dan modern yang senantiasa siap mengamankan dan memberikan sumbangan darma bakti bagi kelancaran pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan nasional (national developments)*. Dari pengertian dasar ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) *peran utuh ABRI* yang meliputi :

1. Mempertahankan kedaulatan tanah air dari ancaman eksternal.
2. Menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman internal.
3. Memberikan sumbangan aktif kepada pembangunan bangsa (nation building).

4. Mendorong pengembangan demokrasi dan masyarakat madani.
5. Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti seluas-luasnya.
6. Berperan aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dalam rangka upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Inilah rumusan utuh peran ABRI yang tidak lagi dikotomik. Sebagaimana paradigma lama yang memisahkan antara peran sebagaimana kekuatan hankam dan kekuatan sospol. Sebagai konsekuensi logis untuk menjabarkan peran utuh ABRI yang tidak lagi dikotomik, dimana aaABRI pada akhirnya tidak akan terlibat dalam politik praktis (*day to day politics*) maka dirumuskan 4 (empat) paradigma baru peran sospol ABRI. Paradigma baru peran sosial politik ABRI merupakan dasar kebijakan pimpinan ABRI untuk segera dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menata kembali peran sosial politik ABRI yang disesuaikan dengan paradigma baru peran ABRI abad XXI.

Jika kita cermati paradigma baru

---

Visi ABRI ke depan adalah : *merupakan kekuatan pertahanan keamanan yang profesional, efektif, efisien dan modern yang senantiasa siap mengamankan dan memberikan sumbangan darma bakti bagi kelancaran pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan nasional (national developments)*.

---

peran sosial politik ABRI, esensinya adalah peran sosial politik ABRI akan surut seiring makin berdayanya masyarakat madani, di mana pada akhirnya ABRI meninggalkan kegiatan politik praktis. Untuk menuju ke arah itu tentunya tidak mungkin seketika dan saat ini juga ada proses dan ada tahapan. Yang jelas komitmen ABRI untuk melaksanakan reformasi internalnya terus berjalan. Suara sumbang dan dan skeptis yang tetap meragukan niat baik dan komitmen ABRI dalam reformasi tidak akan pernah mengecilkan semangat ABRI. ABRI senantiasa melakukan refleksi atas pelaksanaan reformasi dan senantiasa mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa jangan hanya merombak dan mengubah, tanpa menyadari adakah kita masih pada jalur yang benar. Diperlukan pula sebuah perenungan atau refleksi untuk menilai apa yang sudah kita kerjakan.

Selama ini orang hanya berpikir bagaimana menjebol, mengganti dan mengubah tatanan yang ada. Tidak lagi berpikir apakah tatanan itu masih sesuai atau tidak, masih dapat dipertahankan atau tidak. Tidak pula secara cerdas menyikapi eksekusi dan limbah yang ditimbulkan akibat orang bebas berkehendak melakukan apa saja tanpa mengindahkan hukum yang berlaku.

Kita harus melakukan sebuah refleksi atas pelaksanaan reformasi selama ini, beberapa kriteria atau parameter dapat kita adakah reformasi yang kita laksanakan sesuai harapan kita bersama. Pemahaman yang harus kita laksanakan sesuai harapan kita

bersama. Pemahaman yang harus kita bangun bersama dalam menilai reformasi adalah: *Pertama*, reformasi bukan revolusi. *Kedua*, reformasi adalah proses dan perlu waktu. *Ketiga*, reformasi adalah perubahan dan kesinambungan. *Keempat*, reformasi berdimensi struktural dan kultural. *Kelima*, reformasi harus memiliki agenda, prioritas dan tahapan yang konkrit dan jelas. *Keenam*, reformasi harus kita kendalikan supaya tidak keluar dari tujuan dan sasaran serta arah yang kita kehendaki.

Dari keenam kriteria itu kita dapat menilai adakah reformasi yang telah berjalan hampir satu tahun ini telah memenuhi kriteria tersebut. Bagi ABRI kriteria itu penting untuk dijadikan *acuan nasional* untuk menilai dan mengukur pelaksanaan reformasi. Karena dengan terus menerus berupaya melakukan perenungan, kita akan terhindar dari kemungkinan menyimpang dari arah dan tujuan semula.

Dengan kriteria itu pula ABRI secara konsisten terus berusaha memantapkan pelaksanaan reformasi internal dalam menatap masa depannya yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Melalui keteguhan sikap seperti itulah ABRI terus berusaha menjaga komitmennya sebagai bhayangkari negara.

#### IV. KOMITMEN ABRI MENYELAMATKAN BANGSA DAN NEGARA

Tantangan utama yang dihadapi ABRI sebagai bhayangkari negara adalah bagaimana ABRI dan seluruh

komponen bangsa dapat terus menjaga dan menyelamatkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik eksternal maupun internal. Karena sejarahnya yang tidak terpisahkan dengan rakyat dalam mendirikan republik ini, maka posisi dan peran ABRI sebagai bhayangkari negara harus diterjemahkan memiliki posisi dan peran yang sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Dari prinsip dasar ini, ABRI tidak mampu memahami adanya pemikiran dan kehendak segelintir pihak yang ingin memisahkan ABRI dengan rakyat.

Menyadari betapa tantangan tugas ke depan yang makin berat dan kompleks, sudah sepatutnya langkah konkret yang kita bangun adalah bagaimana kita menyatukan langkah bersatu menghadapi persoalan bangsa ini. Bukan bagaimana caranya memisahkan ABRI dengan rakyat. Karena salah satu hasil nyata dari upaya pemisahan itu saat ini dapat dilihat bagaimana rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada ABRI. Lepas dari semua kelemahan dan bahkan kesalahan ABRI atas perannya pada masa lalu, tentu tidak adil jika solusi yang diperlukan adalah mengisolasi ABRI dari rakyat.

Rakyat sebagai kekuatan dasar bhayangkari negara menjadi faktor penentu bagi keberhasilan tugas ABRI

dalam menjaga dan menjamin keamanan dan keselamatan bangsa. Tanpa dukungan rakyat, ABRI jelas tidak akan mampu berbuat banyak. Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah jaminan rasa aman untuk melakukan semua aktivitas kegiatan sehari-hari. Tentu semua pihak harus menyadari bahwa jika ada persoalan yang muncul baik sekonomi, politik dan sosial budaya, limbahnya tidak dapat dihindarkan pasti akan mengalir kepada aspek keamanan. Oleh sebab itu jika kondisi keamanan saat ini

dinilai tidak sepenuhnya terserah pada ABRI. Hal ini bukan berarti ABRI mengelak tanggung jawab. ABRI justru mengajak untuk menyadari bahwa keadaan aman dan ras

---

**Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah jaminan rasa aman untuk melakukan semua aktivitas kegiatan sehari-hari.**

---

aman adalah merupakan kepentingan nasional. Berbicara soal keamanan tidak identik dengan ABRI. Keamanan sebagai kepentingan nasional adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat (pasal 30 UUD 1945). Itulah sebabnya jangan pisahkan ABRI dengan rakyat dalam mengamankan seluruh kepentingan dan agenda nasional.

Khusus menghadapi pemilu dan SU MPR mendatang sebagai salah satu agenda nasional yang sangat strategis, kunci keberhasilannya adalah terletak kepada kita semua. Adakah kita berkehendak untuk menyukseuskannya atau sebaliknya. Bagi ABRI Pemilu memiliki arti dan

makna yang sangat strategis. Pemilu bulan Juni nanti merupakan pintu gerbang utama untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Oleh karena itu Pemilu harus berjalan jujur, adil, aman dan demokratis.

Sukses Pemilu harus memenuhi paling tidak tiga kriteria yaitu : *yuridis, politis* dan *keamanan*. Dilihat dari aspek yuridis Pemilu harus sesuai dengan UU Pemilu dan Peraturan Pemerintah yang terkait, tidak ada distorsi dan cacat secara yuridis.

Dilihat dari aspek politik Pemilu harus dilaksanakan secara *luber* dan *jurdil*. Keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, secara sadar dan bertanggung jawab. Warga negara yang telah memiliki hak pilih menggunakan hak politiknya, kampanye berkualitas mendidik dan etik, semua partai politik peserta Pemilu, pemantau dan masyarakat menerima hasil Pemilu. Dilihat dari aspek keamanan, maka kegiatan kampanye dan pemungutan suara berlangsung secara aman tertib dan lancar. Tidak terjadi benturan fisik antar kontestan maupun tindakan kerusuhan lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman itulah ABRI dan seluruh komponen masyarakat serta partai politik peserta Pemilu harus dengan sungguh-sungguh berusaha mengamankan seluruh tahapan Pemilu. Sementara itu untuk menjamin Pemilu jujur, adil dan demokratis ABRI secara konsisten dan konsekuen bersikap netral.

Sikap politik ABRI tentang netralitas ABRI dalam Pemilu dinyatakan : *Pertama*, ABRI tidak akan melakukan upaya dan rekayasa untuk membantu memenangkan salahsatu partai. *Kedua*, ABRI tidak berpihak, dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik manapun. *Ketiga*, ABRI memberikan perlakuan yang sama secara adil dan proporsional kepada semua partai politik yang ada. *Keempat*, tidak ada keharusan dan larangan bagi anggota KBA dalam menentukan pilihan politiknya. Semua diserahkan para otoritas politik individu masing-masing.

Dari keseluruhan *sikap, langkah* dan *tindakan* ABRI dalam merespons dan melaksanakan eformasi, ABRI menyadari sepenuhnya bahwa melaksanakan reformasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi sekadar menjebol dan merombak. Jika kekuatan menjebol dan merombak jauh lebih besar dari kekuatan untuk memperbaiki dan membangun, maka bangsa ini akan terus mengalami kesulitan yang berkepanjangan. Saat ini justru kekautan untuk memperbaiki dan membangunlah yang diperlukan. Dalam konteks itulah sebenarnya pemahaman ABRI sebagai bhayangkari negara diberi pemaknaan.

Jakarta, 4 Maret 1999



## 14 (EMPAT BELAS) PERUBAHAN MENDASAR AGENDA REFORMASI YANG TELAH DIHASILKAN ABRI

- Pertama,* sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran ABRI abad XXI.
- Kedua,* sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran sopsol ABRI.
- Ketiga,* Pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan pimpinan ABRI mulai 1 April 1999 sebagai transformasi awal.
- Keempat,* penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Tingkat I.
- Kelima,* perubahan sikap Sosial Politik menjadi Staf Teritorial.
- Keenam,* likuidasi Syawan ABRI, Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.
- Ketujuh,* penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim.
- Kedelapan,* penghapusan kekayaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status.
- Kesembilan,* pengurangan jumlah fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II.
- Kesepuluh,* ABRI tidak akan pernah lagi terlibat dalam politik praktis *day to day politic*.
- Kesebelas,* pemutusan hubungan organisatoris dengan partai GOLKAR dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada.
- Keduabelas,* komitmen dan konsistensi netralitas ABRI dalam Pemilu.
- Ketigabelas,* perubahan paradigma hubungan ABRI dan Keluarga Besar ABRI.
- Keempatbelas,* revisi piranti lunak berbagai doktrin ABRI disesuaikan era reformasi dan peran ABRI abad XXI.